

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mewujudkan akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) (Penelitian pada desa-desa di wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, 5(2).
- Apriyani, D., Juliarso, A., & Sahadi, S. (2025). Penerapan Sanksi Hukuman Terhadap Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. *INSKRIPSI*, 2(1), 118-127.
- Astriandy, C. (2018). Analisis Penerapan Good Government Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Fakultas Ekonomi. Universitas Sanada Dharma Yogyakarta.
- Behn, R. D. (2001). *Rethinking democratic accountability*. Globe Pequot Publishing Group Incorporated/Bloomsbury.
- BPKP. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pada Kabupaten Blora.
- Fahmi, M., Yuliani, Y., Fadilah, N. R., & Lidiana, L. (2026). Efektivitas pengelolaan anggaran dana desa: pada perspektif akuntabilitas, partisipasi, dan kepercayaan masyarakat. *Jurnal Lentera Bisnis*, 15(1), 1283-1290.
- Ginting, A. H., Widianingsih, I., Mulyawan, R., & Nurasa, H. (2024). Village fund program in Cibeureum and Sukapura village, Bandung Regency, Indonesia: Problems, risks, and solutions. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2303452.
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 79-91.
- Ilmiah, D. F., Wijayanti, A., & Siddi. (2020). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di kecamatan ampel kabupaten boyolali. *Jurnal Ekonomi-QU*, 10(1), 91-102.
- Indriswari, P. T., & Putra, I. M. W. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1), 5-10.
- Karuh, M. M., & Widyaningrum, T. (2024). Penyelewengan dana desa: tinjauan terhadap korupsi dan upaya penanggulangannya di desa songbledeg, kabupaten wonogiri. *Iblam Law Review*, 4(1), 682-692.

- Keban, Y. T. (2014). Enam dimensi strategis administrasi publik: konsep, teori dan isu.
- Kustono, A. S., Purnamasari, P., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Ledokombo Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2015. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(2), 141-147.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 4(2), 140-158.
- Mardiasmo, (2009). Akuntansi Sektor Publik (Akuntabilitas publik dan dimensi-dimensinya), Yogyakarta, Andi Opset.
- Mardiasmo. (2017). *Otonomi dan Manajemen Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Puspitasari dan Rohman. 2014. *Analisis Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak*.
- Miriam Budiardjo, (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia.
- Mohammad Mahsun, (2012). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, BPFE.
- Moleong, L. J., & Surjaman, T. (2014). Metodologi penelitian kualitatif.
- Nurpuspita, R., Sarfiah, S. N., & Ratnasari, E. D. (2019). Analisis pengelolaan dana desa sebagai realisasi salah satu tujuan program nawacita “membangun Indonesia dari pinggiran” di kecamatan bener kabupaten purworejo tahun 2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(2), 136-150.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. (2015). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa. (2017). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. (2005). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41.
- Putriswandi, A., Djadjuli, R. D., & Henriyani, E. (2025). Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa Melalui Prinsip Kejujuran, Objektivitas, Transparansi, Dan Inovasi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Mekarjadi, Kabupaten Ciamis. *INSKRIPSI*, 2(1), 79-87.
- Rahayu, E. S., Widiawati, H. S., & Winarko, S. P. (2026). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Responsivitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Mensejahterakan Masyarakat. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 6(2), 510-523.
- Sedarmayanti, (2010). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan, Bandung, Refika Aditama.
- Somanteri, A., & Rachmat, R. (2025). Determinasi Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Cianjur Selatan. *Cantaka: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 339-352.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supheni, I. (2016). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)(Studi Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015 Di Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(2).
- Tama, P. S. A., & Wirama, D. G. (2020). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1), 73-87.
- Silalahi, U. (2021). Metode penelitian sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun (2004). Tentang Pemerintahan Daerah.
- Vian, A. (2024). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Desa Sumberkolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2024 (Ejurnal Administrasi Publik 2024).